

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, Badan Pusat Statistika Kota Medan, dan Bank Indonesia. Menggunakan data sekunder berupa data sekunder berupa data realisasi dengan pengambilan data bulanan dimulai dari Januari 2013 hingga Desember 2017, sehingga berjumlah 60 sampel. Semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sebagai sampel karena terbatasnya jumlah populasi yang ada. Jumlah sampel mengalami *outlier* sebanyak 7 sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 53 sampel.

Bentuk data dalam penelitian berupa presentase, nilai satuan mata uang, dan jumlah unit, sehingga sebelum diuji menggunakan SPSS data di transformasikan dalam bentuk logaritma natural (\ln) untuk menyamakan jenis angka pada data penelitian ini. Data variabel yang ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural diantaranya:

1. Variabel penerimaan PPh badan, karena data berbentuk mata uang dengan satuan miliar sehingga ditransformasikan.
2. Variabel nilai tukar kurs, karena data berbentuk mata uang dengan satuan belasan ribuan.
3. Variabel jumlah wajib pajak, karena berbentuk jumlah unit dengan satuan belasan ribuan.

Data inflasi tidak dilakukan transformasi, karena jenis data berupa data presentasi (desimal) sehingga tidak perlu untuk ditransformasikan.

A. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini dilakukan uji statistik deskriptif terhadap variabel-variabel yang digunakan. Variabel independen yang digunakan yaitu tingkat inflasi, nilai tukar kurs, dan jumlah wajib pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan pajak penghasilan badan.

Tabel 4.1 dibawah ini menunjukkan hasil dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean*, dan deviasi standar dari masing-masing variabel.

Tabel 4.1.
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan PPh Badan	53	11569825	23,491716667 4400	340361167 0	3755545062
Tk. Inflasi (TI)	53	-1,36	2,74	,5042	,76939
Nilai Tukar Kurs (NTK)	53	10186,65	14896,1	12981,27	1270,13975
Jumlah WP	53	10357	14671	12647,52	1193,975
Valid N (listwise)	53				

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 53 data. *Mean* atau rata-rata penerimaan pajak

penghasilan badan sebesar 3403611670. Penerimaan pajak penghasilan badan terendah (*minimum*) adalah 11569825 dan penerimaan pajak penghasilan badan tertinggi (*maximum*) 23,4917166674400. Standar deviasi penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 3755545062.

Nilai rata-rata (*mean*) tingkat inflasi menyentuh angka 0,5042% menunjukkan rendahnya angka inflasi selama tahun 2013 sampai dengan 2017. Nilai maksimum tingkat inflasi mencapai angka 2,74% dan minimum sebesar -1,36% yang mana itu menandakan bahwa terjadinya deflasi. Angka pada standar deviasi menyentuh 0,76939% lebih besar dibandingkan nilai *mean* yang hanya 0,5042%. Dengan melihat nilai rata-rata inflasi yang lebih kecil dari standar deviasi maka data yang digunakan dalam variabel inflasi mempunyai sebaran yang cukup besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan merupakan data yang kurang bagus.

Nilai rata-rata (*mean*) nilai tukar sebesar 12981,27 yang menunjukkan bahwa nilai tukar selama tahun 2013 sampai 2017 mengalami kenaikan, dengan nilai maksimum sebesar 14896,1 dan minimum sebesar 10186,65. Standar deviasi nilai tukar sebesar 1270,13975 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Dengan melihat angka standar deviasi yang lebih kecil dari rata-ratanya maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan merupakan data yang bagus.

Variabel Jumlah Wajib Pajak memiliki nilai terkecil (*minimum*) sebesar 10357 dan terbesar (*maximum*) adalah 14671. Rata-rata (*mean*) dari

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah 12647,52. Standar deviasi sebesar 1193,975.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji regresi, perlu dilakukannya serangkaian uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menguji bahwa model yang akan digunakan dalam penelitian ini telah terpenuhi dan juga untuk menghindari hasil penafsiran yang bersifat bias. Dalam penelitian ini ada beberapa macam uji yang akan dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk melanjutkan penelitian uji regresi, harus memenuhi syarat yaitu dengan tidak adanya masalah dalam uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dari masing-masing model adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik ialah yang memiliki hasil distribusi data normal atau mendekati normal (Apriani dan Basuki, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Dengan pengambilan keputusan jika nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat dikatakan data terdistribusi normal. Sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.2.
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^(a,b)	Mean	-,0264326
	Std. Deviation	,54639635
Most Extreme Differences	Absolute	,139
	Positive	,139
	Negative	-,087
Kolmogorov-SmiRnov Z		1.012
Asymp. Sig. (2-tailed)		,257

Sumber: Data diolah

Dalam uji normalitas diatas, tampak hasil signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,257 > 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan dalam penelitian untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen. Model regresi dapat dikatakan baik ketika tidak terjadi korelasi diantara variable bebas (Apriani dan Basuki, 2017). Dalam penelitian ini multikolinearitas dapat dilihat dari hasil perhitungan statistik, jika nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) di atas 10 (> 10) maka dikatakan terjadi multikolinearitas diantara variable dependen, dan sebaliknya jika nilai VIF di bawah 10 (< 10) maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas diantara variable dependen. Dapat juga dilihat dari nilai *tolerance*, apabila lebih dari 0,1 ($> 0,1$) maka dapat dikatakan bebas dari

multikolinearitas dan sebaliknya apabila nilai *tolerance* kurang dari 0,1 ($< 0,1$) maka dapat dikatakan terkena multikolinearitas.

Tabel 4.3.
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TI	,974	1,027
NTK	,215	4,647
Jlh WP	,217	4,599

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil nilai VIF untuk masing-masing variabel independen Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Kurs, dan Jumlah Wajib Pajak adalah 1,027; 4,647; dan 4,599. Dari hasil ketiga variabel independen tersebut diketahui nilai VIF < 10 , maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

Sedangkan berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel independen Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Kurs, dan Jumlah Wajib Pajak adalah 0,974; 0,215; dan 0,217. Dari hasil ketiga variabel independen tersebut diketahui nilai *tolerance* $> 0,1$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain untuk mengetahui penyebaran data (Sari, 2014). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini akan digunakan Uji Glejser untuk melihat apakah data dalam penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak.

Tabel 4.4.
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Sig.
1	(Constant)	,443
	TI	,341
	NTK	,537
	Jlh WP	,323

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Sig. untuk masing-masing variabel independen Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Kurs, dan Jumlah Wajib Pajak adalah 0,341; 0,537; dan 0,323. Dari hasil ketiga variabel independen tersebut diketahui bahwa nilai Sig. > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi diantara kesalahan pengganggu dari satu observasi ke observasi lainnya. Tidak terjadinya autokorelasi dapat dideteksi dengan $DU < DW < 4-DU$.

Tabel 4.5.
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate	Durbin-Watson
1	,820 ^(a)	,672	,652	,46277	1,753

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel di atas dapat dilihat nilai Durbin Watson (DW) yang diperoleh adalah 1,753 lebih besar dari batas atas (dU) sebesar 1,6785 dan pengurangan dari (4-dU) sebesar 2,3215, maka diperoleh persamaan $dU < DW < 4-dU$ yaitu $1,6785 < 1,753 < 2,3215$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Regresi

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen tingkat inflasi, nilai tukar kurs, dan jumlah wajib pajak. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, suatu persamaan regresi harus mempunyai data yang terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, serta

tidak terjadi autokorelasi agar dapat memperoleh hasil persamaan regresi yang baik dan tidak bias. Dalam penelitian ini telah mendapat hasil dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang memenuhi syarat untuk melakukan analisis regresi linear berganda untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis.

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Apriani & Rahmanto, 2017).

Dari data yang diperoleh kemudian di analisis dengan metode regresi dan dihitung dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan *output* SPSS tersebut secara parsial pengaruh dari tiga variabel independen yaitu tingkat inflasi, nilai tukar kurs, dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan ditunjukkan pada Tabel 4.6. sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-18,762	6,769		-2,772	,008
TI	-0,84	,089	-,102	-,941	,351
NTK	,117	1,431	,019	,082	,935
Jlh WP	4,150	1,509	,629	2,749	,008

Sumber: Data diolah

Berdasarkan dari hasil tabel di atas maka persamaan regresi dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :

$$\text{LN PPh Badan} = (-0,102)\text{Inflasi} + 0,019\text{Kurs} + 0,629\text{Wajib Pajak} + e$$

Penjelasan:

- 1) Koefisien regresi untuk tingkat inflasi sebesar -0,102 , artinya setiap kenaikan/bertambahnya satu satuan pada variabel tingkat inflasi akan menyebabkan perubahan/berkurangnya penerimaan pajak penghasilan badan sebesar -0,102 poin.
- 2) Koefisien regresi nilai tukar kurs sebesar 0,019 artinya setiap kenaikan/bertambahnya satu satuan pada variabel nilai tukar kurs akan menyebabkan perubahan/bertambahnya penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 0,019 poin.
- 3) Koefisien regresi jumlah wajib pajak sebesar 0,629, artinya setiap kenaikan/bertambahnya satu satuan pada variabel jumlah wajib pajak akan menyebabkan perubahan/bertambahnya penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 0,629 poin.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Hipotesis Analisis Simultan (Uji F)

Uji analisis simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama antara tingkat inflasi, nilai tukar kurs, dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Uji ini dapat dilihat dari besarnya nilai F hitung dengan F tabel. Hasil lain yang dapat dilihat adalah besarnya nilai signifikansi (Sig.) terhadap alpha (α), di mana $\alpha = 0,05$.

Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7.
Uji Simultan (Uji F)
ANNOVA^b

Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9,301	3	3,100	12,986	,000 ^(a)
Residual	11,698	49	,239		
Total	20,999	49			

Sumber: Data diolah

Berdasarkan analisis data yang diketahui hasil dari F hitung adalah 12,986, selanjutnya mencari hasil dari F tabel dengan cara menentukan k ; n-k (k = jumlah variabel independen) dan (n = jumlah sampel) sehingga 3 ; 53 – 3 = 3 ; 50. Dari hasil tersebut dapat kita masukkan untuk menemukan hasil F tabel yaitu sebesar 2,79. Berarti F hitung 12,986 > F tabel 2,79. Serta Sig. 0,000 < 0,005.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel tingkat inflasi, nilai tukar kurs, dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen penerimaan pajak penghasilan badan.

b. Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t)

Uji t pada penelitian ini berfungsi untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen dalam penelitian yaitu tingkat inflasi, nilai tukar kurs, dan jumlah wajib pajak terhadap variabel dependen penerimaan pajak penghasilan badan. Dalam uji t digunakan alpha (α) sebesar 0,05.

Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas (independen) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen) dan koefisien regresi sesuai dengan arah hipotesis maka hipotesis diterima. Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas (independen) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen) dan koefisien regresi tidak sesuai dengan arah.

Tabel 4.8.
Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.
	Std. Error	
(Constant)	6,769	,008
TI	,089	,351
NTK	1,431	,935
Jlh WP	1,509	,008

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1) Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan tabel 4.12 variabel tingkat inflasi memiliki nilai Sig. $0,351 > 0,05$ dan koefisien variabel sebesar $-0,102$ satuan menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan penerimaan pajak penghasilan badan memiliki arah hubungan yang negatif.

Sehingga hipotesis pertama ditolak dan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

2) Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah nilai tukar kurs berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan tabel 4.12 variabel nilai tukar kurs memiliki nilai Sig. $0,935 > 0,05$ dan koefisien variabel sebesar $0,019$ satuan menunjukkan bahwa nilai tukar kurs dan penerimaan pajak penghasilan badan memiliki arah hubungan positif.

Sehingga hipotesis kedua ditolak dan nilai tukar kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

3) Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan tabel 4.12 variabel jumlah wajib pajak memiliki nilai Sig. $0,008 < 0,05$ dan koefisien variabel sebesar

0,629 satuan menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan badan memiliki arah hubungan positif.

Sehingga hipotesis ketiga diterima dan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Tabel 4.9.
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

H1	Tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan	Ditolak
H2	Nilai tukar kurs berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan	Ditolak
H3	Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan	Diterima

c. Uji Koefisien Determinasi (Adj R²)

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas yaitu Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Kurs, dan jumlah Wajib Pajak menerangkan variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Tabel 4.10.
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate
1	.666(a)	.443	.409	.48861

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS diperoleh *adjusted* $R^2 = 0,409$ (40,9%). Artinya kemampuan variabel independen (Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Kurs, dan Jumlah Wajib Pajak) dalam menjelaskan variabel dependen (Penerimaan Pajak Penghasilan Badan) adalah 40,9% sedangkan sisanya sebesar 59,1% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

B. Pembahasan (Interpretasi)

1. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratama dkk (2016) dan Nasution (2013) yang menyebutkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Inflasi yang tidak berpengaruh signifikan ini dikarenakan pendapatan atau penerimaan suatu badan tidak tergantung oleh inflasi yang sedang terjadi. Perusahaan tidak akan langsung mengganti atau menurunkan harga secara drastis sehingga inflasi tidak mengurangi penerimaan pajak penghasilan badan. Masalah yang muncul pada penerimaan pajak yaitu belum mencapai target yang sudah ditetapkan karena tingkat inflasi yang rendah belum selaras dengan penerimaan pajak Kota Medan Polonia. Karakter kebijakan fiskal Indonesia cenderung ke siklikal bahkan prosiklikal.

Bank Indonesia (2009) menyatakan bahwa kebijakan fiskal Indonesia cenderung bersifat siklikal secara agregat atau justru prosiklikal jika dilihat

dari pengelompokkan pengeluaran. Sifat siklikal tersebut berpotensi memberikan tekanan instabilitas dalam perekonomian, seperti kenaikan inflasi (Surjaningsih dkk, 2012).

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Ferdiawan dkk (2015) dan Pramulia (2009) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

2. Pengaruh Nilai Tukar Kurs terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Hasil menunjukkan nilai tukar kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Eliyah (2005), Mispuyanti dan Kristanti (2017), dan Danu Brata (2007) yang menyatakan bahwa nilai tukar kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pelemahan nilai tukar rupiah lebih disebabkan oleh kebijakan-kebijakan dari pihak luar negeri dan kebijakan pemerintah yang bisa dikatakan belum cukup efektif dan sikap yang kurang tegas dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dalam operasional perusahaan atau badan, kebutuhan akan pemakaian mata uang asing tidak begitu diperlukan karena biasanya yang dilakukan dalam setiap aktivitas perusahaan menggunakan mata uang rupiah.

Nilai kurs yang stabil tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan dikarenakan tidak terdapat keuntungan atau kerugian dari

selisih kurs tersebut. Dan pelemahan nilai tukar rupiah lebih disebabkan oleh kebijakan-kebijakan dari pihak luar negeri dan kebijakan pemerintah yang bisa dikatakan belum cukup efektif dan sikap yang kurang tegas dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Safassi (2011) dan Puspitaningrum (2014) yang menyatakan bahwa nilai tukar kurs berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil menunjukkan jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratamadkk (2016), Anti (2014), Hariyanto dkk (2014), dan Tresno (2012) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Berpengaruhnya jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan karena wajib pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan dan wajib pajak merupakan elemen yang paling penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Meningkatnya jumlah wajib pajak tentu akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan pajak penghasilan badan.

Namun, banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak penghasilan badan akan selalu

meningkat pula. Hal itu harus diimbangi dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan kewajiban perpajakannya karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan sangat mustahil penerimaan pajak meningkat. Sehingga diharapkan pemerintah dapat terus melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya membayar pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nasution dkk (2013) dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.